



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR 34 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN  
BERBASIS ELEKTRONIK  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2023-2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan benar serta berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk mendukung misi reformasi birokrasi dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih dan akuntabel, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menerapkan Sistem Pemerintahan yang Berbasis Elektronik (SPBE);
  - b. bahwa untuk melakukan koordinasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibentuk Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  - c. bahwa sebagai panduan pelaksanaan tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dalam mencapai target Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2023/2024 yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023, perlu ditetapkan Rencana Kerja;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023-2024;



- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 32 Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor 032);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023-2024.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.



6. Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi SPBE adalah tim yang dibentuk untuk melakukan koordinasi penerapan dan kebijakan SPBE serta memberikan arahan, evaluasi dan monitoring SPBE.
7. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur.
8. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur.
9. Rencana Kerja Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023-2024 yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Tim Koordinasi SPBE Tahun 2023-2024 adalah rencana kerja Tim Koordinasi SPBE yang disepakati bersama untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu, secara terarah dan menjadi pegangan dalam mencapai tujuan.
10. Kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Kebijakan SPBE adalah kebijakan internal/pengaturan penyelenggaraan SPBE.
11. Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Tata Kelola SPBE adalah proses/implementasi dari kebijakan SPBE.
12. Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Manajemen SPBE adalah proses/implementasi manajemen untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
13. Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Layanan SPBE adalah layanan pemerintahan berbasis elektronik, baik yang dikembangkan oleh PD maupun Pemerintah Pusat.
14. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur karena dampaknya yang signifikan dan bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah atau panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di masa yang akan datang.
15. Arah Kebijakan adalah arah tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk mengarahkan rasionalitas pilihan rumusan strategi agar lebih terarah dalam menyelesaikan permasalahan dan isu strategis pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur selama 5 (lima) tahun.
16. Strategi adalah rangkaian tahapan atau langkah untuk menyelesaikan permasalahan dan Isu Strategis SPBE Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
17. Solusi Indikatif adalah suatu rancangan awal program prioritas dan kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menyelesaikan permasalahan dan Isu Strategis SPBE Pemerintah Daerah.



18. Indikator adalah variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi dan mengukur berbagai perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu.
19. Pemangku Kepentingan adalah para pihak, lintas pelaku, atau pihak yang terkait dan terlibat dengan penyelenggaraan program kerja SPBE Pemerintah Daerah.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

## **Pasal 2**

Maksud ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan tugas Tim Koordinasi SPBE dalam mencapai tujuan penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.

## **Pasal 3**

Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah meningkatkan keterpaduan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE dan audit teknologi informasi dan komunikasi serta pemantauan dan evaluasi SPBE.

## **Pasal 4**

- (1) Rencana Kerja Tim Koordinasi SPBE Tahun 2023-2024 mencakup:
  - a. Isu Strategis;
  - b. Arah Kebijakan;
  - c. rumusan strategi;
  - d. Solusi Indikatif;
  - e. aspek perubahan;
  - f. sumber dana;
  - g. Indikator;
  - h. Pemangku Kepentingan; dan
  - i. capaian target pertahun.
- (2) Dokumen Rencana Kerja Tim Koordinasi SPBE Tahun 2023-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## **Pasal 5**

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada:

- a. APBD; dan
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.



## Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 13 JUNI 2023

RE GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

RE VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang

pada tanggal 13 JUNI 2023

SEKRETARIS DAERAH

RE PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, RE

RE KOSMAS D. LANA

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023 NOMOR



**LAMPIRAN**

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR** : 34 TAHUN 2023

**TANGGAL** : 13 JUNI 2023

**TENTANG RENCANA KERJA TIM KOORDINASI SPBE TAHUN 2023-2024**

No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap	
								2023	2024
	Reformasi Birokrasi Pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik	Percepatan pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan TIK secara efektif, efisien, dan berkesinambungan	Penetapan Kebijakan SPBE	APBD	Jumlah kebijakan SPBE Pemerintah Provinsi NTT	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT (PJ); Biro Hukum Setda Provinsi NTT; Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT; Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; Biro Organisasi Setda Provinsi NTT.		



No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap	
								2023	2024
1				Penyusunan kebijakan pembentukan tim pelaksana sistem pemerintahan berbasis elektronik instansi pemerintah	APBD	Jumlah kebijakan pembentukan tim pelaksana sistem pemerintahan berbasis elektronik instansi pemerintah (dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/terstandarisasi/ terintegrasi dan terukur/optimum)	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT (PJ); Biro Hukum Setda Provinsi NTT; Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; Biro Organisasi Setda Provinsi NTT.	1	
2				Penyusunan kebijakan inovasi proses kerja terintegrasi	APBD	Jumlah kebijakan inovasi proses kerja terintegrasi (dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/terstandarisasi/ terintegrasi dan terukur/optimum.	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT (PJ); Biro Hukum Setda Provinsi NTT; Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; Biro Organisasi Setda Provinsi NTT.		1
3				Penyusunan kebijakan anggaran	APBD	Jumlah kebijakan anggaran	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT (PJ);		1

14



No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap	
								2023	2024
				dan belanja TIK		dan belanja TIK dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/ terstandardisasi/ terintegrasi dan terukur/optimum	Biro Hukum Setda Provinsi NTT; Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; Biro Organisasi Setda Provinsi NTT.		
4				Penyusunan kebijakan data dan informasi elektronik	APBD	Jumlah kebijakan data dan informasi elektronik dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/ terstandardisasi/ terintegrasi dan terukur/optimum	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT (PJ); Biro Hukum Setda Provinsi NTT; Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; Biro Organisasi Setda Provinsi NTT.	1	
5				Penyusunan kebijakan pusat data terpadu	APBD	Jumlah kebijakan pusat data terpadu dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT (PJ); Biro Hukum Setda Provinsi NTT; Badan Perencanaan Pembangunan,		1



No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap	
								2023	2024
						terstandardisasi/ terintegrasi dan terukur/optimum	Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; Biro Organisasi Setda Provinsi NTT.		
6				Penyusunan kebijakan infrastruktur jaringan TIK	APBD	Jumlah kebijakan infrastruktur jaringan TIK dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/ terstandardisasi/ terintegrasi dan terukur/optimum	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT (PJ); Biro Hukum Setda Provinsi NTT; Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; Biro Organisasi Setda Provinsi NTT.	1	
7				Penyusunan kebijakan sistem penghubung layanan pemerintah daerah	APBD	Jumlah kebijakan sistem penghubung layanan pemerintah daerah dengan tingkat kematangan kapabilitas	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT (PJ); Biro Hukum Setda Provinsi NTT; Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan	1	

14



No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap	
								2023	2024
						proses yang terkelola/ terstandardisasi/ terintegrasi dan terukur/optimum	Pengembangan Daerah Provinsi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; Biro Organisasi Setda Provinsi NTT.		
8				Penyusunan kebijakan integrasi aplikasi	APBD	Jumlah kebijakan integrasi aplikasi dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/ terstandardisasi/ terintegrasi dan terukur/optimum	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT (PJ); Biro Hukum Setda Provinsi NTT; Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; Biro Organisasi Setda Provinsi NTT.		1
9				Penyusunan kebijakan aplikasi umum berbagi pakai	APBD	Jumlah kebijakan aplikasi umum berbagi pakai dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT (PJ); Biro Hukum Setda Provinsi NTT; Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan		1



No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap	
								2023	2024
						terstandardisasi/ terintegrasi dan terukur/optimum	Pengembangan Daerah Provinsi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT Biro Organisasi Setda Provinsi NTT.		
10				Penyusunan kebijakan keamanan data dan informasi elektronik	APBD	Jumlah kebijakan keamanan data dan informasi elektronik dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/terstandardisasi/ terintegrasi dan terukur/optimum	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT (PJ); Biro Hukum Setda Provinsi NTT; Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; Biro Organisasi Setda Provinsi NTT.		1
11				Penyusunan kebijakan keterbukaan data	APBD	Jumlah kebijakan keterbukaan data dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/ terstandardisasi/ terintegrasi dan	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT (PJ); Biro Hukum Setda Provinsi NTT; Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan		1



No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap	
								2023	2024
						terukur/optimum	Daerah Provinsi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; Biro Organisasi Setda Provinsi NTT.		
12				Penyusunan kebijakan satu data terpadu	APBD	Jumlah kebijakan satu data terpadu dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/ terstandardisasi/te rintegrasi dan terukur/optimum	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT (PJ); Biro Hukum Setda Provinsi NTT; Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; Biro Organisasi Setda Provinsi NTT.		1

ku



No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap	
								2023	2024
13				Penyusunan kebijakan keamanan informasi (privasi, integritas, otentifikasi, ketersediaan, riwayat kejadian, hak akses)	APBD	Jumlah kebijakan keamanan informasi dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/ terstandardisasi/ terintegrasi dan terukur/optimum	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT (PJ); Biro Hukum Setda Provinsi NTT; Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; Biro Organisasi Setda Provinsi NTT.		1
14				Penyusunan kebijakan manajemen SPBE	APBD	Jumlah kebijakan manajemen SPBE dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/ terstandardisasi/ terintegrasi dan terukur/optimum	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT (PJ); Biro Hukum Setda Provinsi NTT; Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; Biro Organisasi Setda Provinsi NTT.		1

ke



No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap	
								2023	2024
15				Penyusunan kebijakan standar mutu, layanan, dan aplikasi	APBD	Jumlah kebijakan standar mutu, layanan, dan aplikasi dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/terstandarisasi/terintegrasi dan terukur/optimum	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT (PJ); Biro Hukum Setda Provinsi NTT; Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; Biro Organisasi Setda Provinsi NTT.		1
16				Penyusunan kebijakan pengelolaan situs resmi Pemerintah Provinsi NTT (domain, sub domain)	APBD	Jumlah kebijakan pengelolaan situs resmi Pemerintah Provinsi NTT dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/terstandarisasi/terintegrasi dan terukur/optimum	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT.	1	
17				Penyusunan kebijakan layanan naskah dinas berbasis	APBD	Jumlah kebijakan layanan naskah dinas berbasis elektronik dengan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT (PJ); Biro Organisasi Setda Provinsi	1	

12



No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap	
								2023	2024
				elektronik		tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/ terstandardisasi/ terintegrasi dan terukur/optimum	NTT; Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT; Biro Hukum Setda Provinsi NTT; Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT.		
18				Penyusunan kebijakan layanan manajemen kepegawaian berbasis elektronik	APBD	Jumlah kebijakan layanan manajemen kepegawaian berbasis elektronik dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/ terstandardisasi/ terintegrasi dan terukur/optimum	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT (PJ); Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT; Biro Hukum Setda Provinsi NTT; Biro Organisasi Setda Provinsi NTT.	1	
19				Penyusunan kebijakan layanan manajemen perencanaan dan	APBD	Jumlah kebijakan layanan manajemen perencanaan dan penganggaran berbasis	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi	1	



No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap	
								2023	2024
				penganggaran berbasis elektronik		elektronik dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/ terstandardisasi/ terintegrasi dan terukur/optimum	NTT (PJ); Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT ; Biro Hukum Setda Provinsi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT.		
20				Penyusunan kebijakan layanan manajemen keuangan berbasis elektronik	APBD	Jumlah kebijakan layanan manajemen keuangan berbasis elektronik dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/ terstandardisasi terintegrasi dan terukur/optimum	Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT (PJ); Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT; Biro Hukum Setda Provinsi NTT; Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT.		1
21				Penyusunan kebijakan layanan manajemen aset/barang daerah berbasis elektronik	APBD	Jumlah kebijakan layanan manajemen aset/barang daerah berbasis elektronik dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT(PJ); Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT; Biro Hukum Setda Provinsi NTT; Badan		1



No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap	
								2023	2024
						terkelola/terstandarisasi/terintegrasi dan terukur/optimum	Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT.		
22				Penyusunan kebijakan layanan manajemen kinerja berbasis elektronik	APBD	Jumlah kebijakan layanan manajemen kinerja berbasis elektronik dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/terstandardisasi/terintegrasi dan terukur/optimum	Biro Organisasi Setda Provinsi NTT (PJ); Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT; Biro Hukum Setda Provinsi NTT; Inspektorat Daerah Provinsi NTT; Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT.		1
23				Penyusunan kebijakan layanan pengadaan berbasis elektronik	APBD	Jumlah kebijakan layanan pengadaan berbasis elektronik dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang	Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT (PJ); Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT;		1



No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap	
								2023	2024
						terkelola/terstandarisasi/terintegrasi dan terukur/optimum	Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; Inspektorat Daerah Provinsi NTT; Biro Hukum Setda Provinsi NTT.		
24				Penyusunan kebijakan layanan surat elektronik	APBD	Jumlah kebijakan layanan surat elektronik dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/terstandardisasi/terintegrasi dan terukur/optimum	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT (PJ); Biro Umum Setda Provinsi NTT; Biro Organisasi Setda Provinsi NTT; Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT; Biro Hukum Setda Provinsi NTT.		1
25				Penyusunan kebijakan sistem pendukung keputusan (Manajemen Pengetahuan)	APBD	Jumlah kebijakan sistem pendukung keputusan dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/terstandardisasi/terintegrasi dan terukur/optimum	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT (PJ); Biro Organisasi Setda Provinsi NTT; Biro Hukum Setda Provinsi NTT; Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan		1



No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap	
								2023	2024
							Daerah Provinsi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; Inspektorat Daerah Provinsi NTT.		
26				Penyusunan kebijakan sistem informasi kerjasama dalam negeri non investasi	APBD	Jumlah kebijakan layanan kolaborasi dan koordinasi berbasis elektronik dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/ terstandardisasi/ terintegrasi dan terukur/optimum	Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT (PJ); Biro Organisasi Setda Provinsi NTT; Biro Hukum Setda Provinsi NTT; Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT; Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT.		1
27				Penyusunan kebijakan manajemen pelaporan pemerintahan daerah berbasis	APBD	Jumlah kebijakan manajemen pelaporan pemerintahan daerah berbasis elektronik dengan tingkat	Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT (PJ); Biro Organisasi Setda Provinsi NTT (PJ); Biro Hukum Setda		1



No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap	
								2023	2024
				elektronik (LPPD)		kematangan kapabilitas proses yang terkelola/terstandarisasi/terintegrasi dan terukur/optimum	Provinsi NTT; Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT; Inspektorat Daerah Provinsi NTT; Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT.		
28				Penyusunan kebijakan layanan administrasi DPRD berbasis elektronik	APBD	Jumlah kebijakan layanan administrasi DPRD berbasis elektronik dengan tingkat	Sekretariat DPRD Provinsi NTT (PJ); Biro Organisasi Setda Provinsi NTT;		1

MA



No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap	
								2023	2024
						kematangan kapabilitas proses yang terkelola/ terstandardisasi/ terintegrasi dan terukur/optimum	Biro Hukum Setda Provinsi NTT;Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT;Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT; Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT.		
29				Penyusunan kebijakan layanan penelitian dan pengembangan berbasis elektronik	APBD	Jumlah kebijakan layanan penelitian dan pengembangan berbasis elektronik dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/ terstandardisasi/ terintegrasi dan terukur/optimum	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT (PJ); Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Perguruan Tinggi Negeri/ Perguruan Tinggi Swasta Provinsi NTT; Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT; Inkubator Bisnis dan Teknologi Kabupaten/ Kota Se NTT.		1
30				Penyusunan kebijakan	APBD	Jumlah kebijakan layanan	Inspektorat Daerah Provinsi	1	



No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap	
								2023	2024
				layanan pengaduan publik berbasis elektronik		pengaduan publik berbasis elektronik dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/ terstandardisasi/ terintegrasi dan terukur/optimum	NTT (PJ); Biro Organisasi Setda Provinsi NTT; Biro Hukum Setda Provinsi NTT; Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT; Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT; PPID Utama Provinsi NTT; Media.		
31				Penyusunan kebijakan layanan dokumentasi dan informasi hukum berbasis elektronik	APBD	Jumlah kebijakan layanan dokumentasi dan informasi hukum berbasis elektronik dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/ terstandar disasi/ terintegrasi dan	Biro Hukum Setda Provinsi NTT (PJ); Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT; Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT; Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT.	1	



No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap	
								2023	2024
						terukur/optimum			
32				Penyusunan kebijakan layanan whistle blowing system berbasis elektronik	APBD	Jumlah kebijakan layanan whistle blowing system berbasis elektronik dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/terstandardisasi/terintegrasi dan terukur/optimum	Inspektorat Daerah Provinsi NTT (PJ); Biro Hukum Provinsi NTT; Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT ; Polda/Polres/Polresta se NTT; Kejaksaan Tinggi Provinsi NTT; Kejaksaan Negeri; Kabupaten/Kota; KPK; Media.		1
33				Pengadaan sistem pengawasan internal yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan tindak lanjut audit kepegawaian	APBD	Jumlah pengadaan sistem pengawasan internal yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan tindak lanjut audit kepegawaian	Inspektorat Daerah Provinsi NTT (PJ).		1
34				Pengawasan produk Hukum	APBD	Jumlah dokumen	Biro Hukum Setda Provinsi NTT (PJ).	1	



No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap	
								2023	2024
				Kabupaten/ Kota					
35				Penyusunan kebijakan layanan perpajakan dan retribusi daerah berbasis elektronik	APBD	Jumlah kebijakan layanan perpajakan dan retribusi daerah berbasis elektronik dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/terstandar disasi/ terintegrasi dan terukur/optimum	Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT (PJ); Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT; Inspektorat Daerah Provinsi NTT; Pelaku Usaha Kabupaten/Kota di Provinsi NTT.		1
36				Penyusunan kebijakan layanan perizinan terpadu berbasis elektronik	APBD	Jumlah kebijakan layanan perizinan terpadu berbasis elektronik dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/terstandardisasi/terintegrasi dan terukur/optimum	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT (PJ); Biro Organisasi Setda Provinsi NTT; Biro Hukum Setda Provinsi NTT; Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT;		1

u



No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap	
								2023	2024
							Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT; Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT; Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTT; Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota di Provinsi NTT		
37				Penyusunan kebijakan layanan informasi publik terpadu berbasis elektronik	APBD	Jumlah kebijakan layanan informasi publik terpadu berbasis elektronik dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang dikelola/	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT (PJ); Biro Organisasi Setda Provinsi NTT; Biro Hukum Setda Provinsi NTT; PPID Utama Provinsi NTT; Inspektorat	1	



No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap	
								2023	2024
						terstandardisasi/terintegrasi dan terukur/optimum	Daerah Provinsi NTT; Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT.		
38				Penyusunan kebijakan layanan pendidikan berbasis elektronik	APBD	Jumlah kebijakan layanan pendidikan berbasis elektronik dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/terstandardisasi/terintegrasi dan terukur/optimum	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT (PJ); SMA Negeri/Swasta Kabupaten/Kota Se NTT; SMP Negeri/Swasta Kabupaten/Kota di se NTT; SD Negeri/Swasta Kabupaten/Kota di se NTT; Dewan Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota di NTT; Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT; Lembaga Pendidikan dan Ketrampilan Kabupaten/Kota di Provinsi NTT; Media Massa/Elektronik; PTN/PTS.		1



No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap	
								2023	2024
39				Penyusunan kebijakan layanan kesehatan berbasis elektronik	APBD	Jumlah kebijakan layanan kesehatan berbasis elektronik dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/terstandarisasi/terintegrasi dan terukur/optimum	Dinas Kesehatan Provinsi NTT (PJ); RSUD Provinsi/Kabupaten/Kota di NTT; Puskesmas Kabupaten/Kota di NTT; RS Swasta Kabupaten/Kota di NTT; IDI NTT; BPJS Kabupaten/Kota di NTT; Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT.		1
40				Penyusunan kebijakan layanan pekerjaan umum dan penataan ruang berbasis elektronik	APBD	Jumlah kebijakan layanan pekerjaan umum dan penataan ruang berbasis elektronik dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/terstandarisasi/terintegrasi dan terukur/optimum	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT & Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTT (PJ); Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi		1



No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap	
								2023	2024
							NTT; Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT.		
41				Penyusunan kebijakan layanan perumahan rakyat dan kawasan permukiman berbasis elektronik	APBD	Jumlah kebijakan layanan perumahan rakyat dan kawasan permukiman berbasis elektronik dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/ terstandardisasi/ terintegrasi dan terukur/optimum	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat & Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTT (PJ); Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT; Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT.		1
42				Penyusunan kebijakan layanan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat berbasis elektronik	APBD	Jumlah kebijakan layanan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat berbasis elektronik dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT (PJ); Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota di NTT; Polda/Polres/Polresta di NTT; Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT.		1



No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap	
								2023	2024
						terkelola/terstandarisasi/terintegrasi dan terukur/optimum			
43				Penyusunan kebijakan layanan sosial berbasis elektronik	APBD	Jumlah kebijakan layanan sosial berbasis elektronik dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/terstandarisasi/terintegrasi dan terukur/optimum	Dinas Sosial Provinsi NTT (PJ); Dinas Kesehatan Provinsi/ Kabupaten/Kota di NTT; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi/Kabupaten/Kota di NTT; Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi/ Kabupaten/Kota di NTT; Dinas Koperasi, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Provinsi/ Kabupaten/Kota di NTT; Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi/		1



No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap	
								2023	2024
							Kabupaten/Kota Di NTT ; Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT; Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT; Pekerja Sosial Kabupaten/Kota di NTT; Panti Sosial Kabupaten/Kota di NTT.		
44				Penyusunan kebijakan layanan tenaga kerja berbasis elektronik	APBD	Jumlah kebijakan layanan tenaga kerja berbasis elektronik dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/ terstandardisasi/te rintegrasi dan terukur/optimum	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Provinsi NTT (PJ); Dinas Koperasi, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten/Kota di Provinsi NTT; Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT; Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT.		1



No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap	
								2023	2024
45				Penyusunan kebijakan layanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berbasis elektronik	APBD	Jumlah kebijakan layanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berbasis elektronik dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/ terstandardisasi/ terintegrasi dan terukur/optimum	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT (PJ); Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten/Kota di NTT; Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT.		1
46				Penyusunan kebijakan layanan pangan berbasis elektronik	APBD	Jumlah kebijakan layanan pangan berbasis elektronik dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/terstanda rdisasi/ terintegrasi dan terukur/optimum	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT (PJ); Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota di NTT; Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT.		1
47				Penyusunan kebijakan layanan lingkungan hidup berbasis elektronik	APBD	Jumlah kebijakan layanan lingkungan hidup berbasis elektronik dengan tingkat kematangan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT (PJ); Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		1



No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap	
								2023	2024
						kapabilitas proses yang terkelola/ terstandardisasi/ terintegrasi dan terukur/optimum	Kabupaten/Kota di NTT; Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT.		
48				Penyusunan kebijakan layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil berbasis elektronik	APBD	Jumlah kebijakan layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil berbasis elektronik dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/ terstandardisasi/ terintegrasi dan terukur/optimum	Dinas Kesehatan Provinsi NTT (PJ); Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota di NTT; Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT.		1
49				Penyusunan kebijakan layanan perhubungan berbasis elektronik	APBD	Jumlah kebijakan layanan perhubungan berbasis elektronik dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/ terstandardisasi/ terintegrasi dan terukur/optimum	Dinas Perhubungan Provinsi NTT (PJ); Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota di NTT; Pengelola Online Drivers; Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT.		1



No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap	
								2023	2024
50				Penyusunan kebijakan layanan koperasi, usaha kecil, dan menengah berbasis elektronik	APBD	Jumlah kebijakan layanan koperasi, usaha kecil, dan menengah berbasis elektronik dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/terstandarisasi/terintegrasi dan terukur/optimum	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Provinsi NTT (PJ); Dinas Koperasi, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten/Kota di NTT; Koperasi Kabupaten/Kota di NTT; UMKM Kabupaten/Kota di NTT; Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT.		1
51				Penyusunan kebijakan layanan kepemudaan dan olah raga berbasis elektronik	APBD	Jumlah kebijakan layanan kepemudaan dan olah raga berbasis elektronik dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/terstandardisasi/terintegrasi dan terukur/optimum	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT (PJ); Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota di NTT; KONI Kabupaten/Kota di NTT; Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT.		1



No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap	
								2023	2024
52				Penyusunan kebijakan layanan kebudayaan berbasis elektronik	APBD	Jumlah kebijakan layanan kebudayaan berbasis elektronik dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/ terstandardisasi/ terintegrasi dan terukur/optimum	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT (PJ); Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota di NTT; Seniman Kabupaten/Kota di NTT; Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT.		1
53				Penyusunan kebijakan layanan perpustakaan berbasis elektronik	APBD	Jumlah kebijakan layanan perpustakaan berbasis elektronik dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/ terstandardisasi/ terintegrasi dan terukur/optimum	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT (PJ); Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten/Kota di NTT; Perpustakaan PTN/PTS NTT; Perpustakaan Sekolah Kabupaten/Kota di NTT; Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT.		1

ml



No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap	
								2023	2024
54				Penyusunan kebijakan layanan kearsipan berbasis elektronik	APBD	Jumlah kebijakan layanan kearsipan berbasis elektronik dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/terstandarisasi/ terintegrasi dan terukur/optimum	Dinas Kearsipan & Perpustakaan Daerah Provinsi NTT (PJ); Dinas Kearsipan & Perpustakaan Kabupaten/Kota di NTT; Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT.		1
55				Penyusunan kebijakan layanan pariwisata berbasis elektronik	APBD	Jumlah kebijakan layanan pariwisata berbasis elektronik dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/terstandarisasi/ terintegrasi dan terukur/optimum	Dinas Pariwisata dan EKonomi Kreatif Provinsi NTT (PJ); Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten/Kota di NTT; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi/ Kabupaten/Kota Di NTT; Badan Promosi Daerah NTT/Kabupaten/ Kota di NTT; Pengelola Destinasi Wisata;		1



No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap	
								2023	2024
							Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT.		
56				Penyusunan kebijakan layanan pertanian berbasis elektronik	APBD	Jumlah kebijakan layanan pertanian berbasis elektronik dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/terstandarisasi/terintegrasi dan terukur/optimum	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT (PJ); Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota di NTT; Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT.		1
57				Penyusunan kebijakan layanan perdagangan berbasis elektronik	APBD	Jumlah kebijakan layanan perdagangan berbasis elektronik dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/terstandardisasi/terintegrasi dan terukur/optimum	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT (PJ); Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten/Kota di NTT; Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT.		1
58				Penyusunan kebijakan layanan	APBD	Jumlah kebijakan layanan	Biro Perekonomian		1



No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap	
								2023	2024
				perindustrian berbasis elektronik		perindustrian berbasis elektronik dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/ terstandardisasi/ terintegrasi dan terukur/optimum	Dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT (PJ); Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT; Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten/Kota di Provinsi NTT; Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT.		
59				Penyusunan kebijakan layanan publik instansi pemerintah daerah lainnya berbasis elektronik	APBD	Jumlah kebijakan layanan publik instansi pemerintah daerah lainnya berbasis elektronik dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/ terstandardisasi/ terintegrasi dan terukur/optimum	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT (PJ); Perangkat Daerah lingkup Provinsi NTT terkait.		1
60				Penyusunan tata kelola tim pelaksana	APBD	Jumlah kebijakan tentang tata	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT (PJ);		1



No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap	
								2023	2024
				sistem pemerintahan berbasis elektronik		kelola tim pengarah dan tim pelaksana sistem pemerintahan berbasis elektronik dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/ terstandardisasi/ terintegrasi dan terukur/optimum	Biro Organisasi Setda Provinsi NTT; Biro Hukum Setda Provinsi NTT; Tim Koordinasi SPBE Provinsi NTT.		
61				Penyusunan tata kelola inovasi proses kerja terintegrasi	APBD	Jumlah kebijakan tentang tata kelola inovasi proses kerja terintegrasi dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/ terstandardisasi/ terintegrasi dan terukur/optimum	Biro Organisasi Setda Provinsi NTT (PJ) ; Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT; Biro Hukum Setda Provinsi NTT; Tim Koordinasi SPBE Provinsi NTT.		1
62				Penyusunan tata	APBD	Jumlah kebijakan tentang tata	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT (PJ);		1

12



No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap	
								2023	2024
				kelola anggaran dan belanja TIK		kelola anggaran dan belanja TIK dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/ terstandardisasi/ terintegrasi dan terukur/optimum	Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT; Biro Organisasi Setda Provinsi NTT; Biro Hukum Setda Provinsi NTT; Inspektorat Daerah Provinsi NTT.		
63				Penyusunan tata kelola pengelolaan data dan informasi elektronik	APBD	Jumlah kebijakan tentang tata kelola pengelolaan data dan informasi elektronik dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/ terstandardisasi/ terintegrasi dan terukur/optimum	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT (PJ); Biro Organisasi Setda Provinsi NTT; Biro Hukum Setda Provinsi NTT; Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; Badan		1



No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap	
								2023	2024
							Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT; Inspektorat Daerah Provinsi NTT.		
64				Penyusunan tata kelola pengoperasian pusat data terpadu	APBD	Jumlah kebijakan tentang tata kelola pengoperasian pusat data terpadu dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/ terstandardisasi/ terintegrasi dan terukur/optimum	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT (PJ); Biro Organisasi Setda Provinsi NTT; Biro Hukum Setda Provinsi NTT; Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT; Inspektorat Daerah Provinsi NTT.		1



No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap	
								2023	2024
65				Penyusunan tata kelola integrasi aplikasi	APBD	Jumlah kebijakan tentang tata kelola integrasi aplikasi dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/ terstandarisasi/ terintegrasi dan terukur/optimum	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT (PJ); Biro Organisasi Setda Provinsi NTT; Biro Hukum Setda Provinsi NTT; Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT; Inspektorat Daerah Provinsi NTT.		1
66				Penyusunan tata kelola pengelolaan infrastruktur jaringan TIK	APBD	Jumlah kebijakan tentang tata kelola pengelolaan infrastruktur jaringan TIK dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT (PJ); Biro Organisasi Setda Provinsi NTT; Biro Hukum Setda Provinsi NTT; Badan Keuangan		1



No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap	
								2023	2024
						terstandardisasi/ terintegrasi dan terukur/optimum	Daerah Provinsi NTT; Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT; Inspektorat Daerah Provinsi NTT; Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTT; Dinas Perhubungan Provinsi NTT.		
67				Penyusunan tata kelola pengelolaan	APBD	Jumlah kebijakan tentang tata kelola pengelolaan sistem	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT (PJ);		1



No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap	
								2023	2024
				sistem penghubung layanan pemerintah daerah		penghubung layanan pemerintah daerah dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/ terstandardisasi/ terintegrasi dan terukur/optimum	Biro Organisasi Setda Provinsi NTT; Biro Hukum Setda Provinsi NTT; Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT; Inspektorat Daerah Provinsi NTT.		
68				Penyusunan tata kelola pengelolaan aplikasi layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik	APBD	Jumlah kebijakan tentang tata kelola pengelolaan aplikasi layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT (PJ); Biro Organisasi Setda Provinsi NTT; Biro Hukum Setda Provinsi NTT; Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT; Badan Keuangan		1



No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap	
								2023	2024
						terstandardisasi/ terintegrasi dan terukur/optimum	Daerah Provinsi NTT; Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT; Inspektorat Daerah Provinsi NTT.		
69				Penyusunan tata kelola integrasi aplikasi	APBD	Jumlah kebijakan tentang tata kelola integrasi aplikasi dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/ terstandardisasi/ terintegrasi dan terukur/optimum	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT (PJ); Biro Organisasi Setda Provinsi NTT; Biro Hukum Setda Provinsi NTT; Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT;		1

ju



No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap	
								2023	2024
							Inspektorat Daerah Provinsi NTT.		
70				Penyusunan tata kelola pengelolaan aplikasi umum berbagi pakai		Jumlah kebijakan tentang tata kelola pengelolaan aplikasi umum berbagi pakai dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/ terstandardisasi/ terintegrasi dan terukur/optimum	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT (PJ); Biro Organisasi Setda Provinsi NTT; Biro Hukum Setda Provinsi NTT; Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT; Inspektorat Daerah Provinsi NTT.		
71				Penyusunan manajemen risiko sistem pemerintahan berbasis	APBD	Jumlah dokumen manajemen risiko sistem pemerintahan berbasis elektronik dengan	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT (PJ); Biro Organisasi Setda Provinsi		1



No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap	
								2023	2024
				elektronik		tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/ terstandardisasi/ terintegrasi dan terukur/optimum	NTT; Biro Hukum Setda Provinsi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT; Inspektorat Daerah Provinsi NTT.		
72				Penyusunan manajemen keamanan data dan informasi elektronik		Jumlah dokumen manajemen keamanan data dan informasi elektronik dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/ terstandardisasi/ terintegrasi dan terukur/optimum	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT (PJ); Biro Organisasi Setda Provinsi NTT; Biro Hukum Setda Provinsi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan		



No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap	
								2023	2024
							Daerah Provinsi NTT; Inspektorat Daerah Provinsi NTT; Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT; PPID Utama Provinsi NTT.		
73				Penyusunan manajemen SDM TIK	APBD	Jumlah dokumen manajemen SDM TIK dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/ terstandardisasi/te rintegrasi dan terukur/optimum	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT (PJ); Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT; Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi NTT; Dinas Pendidikan & Kebudayaan Provinsi NTT; Dinas Koperasi, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi		1

mu



No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap	
								2023	2024
							Provinsi NTT; Biro Organisasi Setda Provinsi NTT; Biro Hukum Setda Provinsi NTT; Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT; Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; Inspektorat Daerah Provinsi NTT.		
74				Penyusunan manajemen pengetahuan sistem pemerintahan berbasis elektronik	APBD	Jumlah dokumen manajemen pengetahuan sistem pemerintahan berbasis elektronik dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/ terstandardisasi/	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT (PJ); Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT; Badan Keuangan		1

u



No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap	
								2023	2024
						terintegrasi dan terukur/optimum	Daerah Provinsi NTT; Biro Organisasi Setda Provinsi NTT; Biro Hukum Setda Provinsi NTT; Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT; Inspektorat Daerah Provinsi NTT.		
75				Penyusunan manajemen layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik	APBD	Jumlah dokumen manajemen layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/terstandardisasi/terintegrasi dan terukur/optimum	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT (PJ); Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; Biro Organisasi Setda Provinsi NTT; Biro Hukum Setda Provinsi NTT; Biro Pemerintahan Setda Provinsi		1



No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap	
								2023	2024
							NTT; Inspektorat Daerah Provinsi NTT.		
76				Penyusunan manajemen perubahan sistem pemerintahan berbasis elektronik	APBD	Jumlah dokumen manajemen perubahan sistem pemerintahan berbasis elektronik dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/ terstandardisasi/ terintegrasi dan terukur/optimum	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT (PJ); Biro Organisasi Setda Provinsi NTT; Biro Hukum Setda Provinsi NTT; Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT; Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; Inspektorat Daerah Provinsi NTT.		1
77				Penyusunan manajemen data dan informasi elektronik	APBD	Jumlah dokumen manajemen data dan informasi elektronik dengan tingkat	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT (PJ); Biro Organisasi		1



No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap	
								2023	2024
						kematangan kapabilitas proses yang terkelola/terstandarisasi/terintegrasi dan terukur/optimum	Setda Provinsi NTT; Biro Hukum Setda Provinsi NTT; Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT; Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; Inspektorat Daerah Provinsi NTT; Dinas Kearsipan & Perpustakaan Provinsi NTT; PPID Utama Provinsi NTT.		
78				Implementasi sesuai dengan Arsitektur dan Peta Rencana sistem pemerintahan berbasis elektronik	APBD				1

ml



No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap	
								2023	2024
						Presentase Implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/ terstandardisasi/ terintegrasi dan terukur/optimum	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT (PJ); Biro Organisasi Setda Provinsi NTT; Biro Hukum Setda Provinsi NTT; Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT; Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; Inspektorat Daerah Provinsi NTT.		
79				Penyusunan cetak biru SDM TIK	APBD	Jumlah dokumen cetak biru SDM TIK dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/ terstandardisasi/	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT (PJ); Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT;		1



No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap	
								2023	2024
						terintegrasi dan terukur/optimum	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi NTT; Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT; Dinas Koperasi, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Provinsi NTT; Biro Organisasi Setda Provinsi NTT; Biro Hukum Setda Provinsi NTT; Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT; Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT.		
80				Penyusunan cetak biru	APBD	Jumlah dokumen cetak biru infrastruktur	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT		1

tu



No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap	
								2023	2024
				infrastruktur jaringan TIK		jaringan TIK dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/terstandarisasi/ terintegrasi dan terukur/optimum	(PJ); Biro Organisasi Setda Provinsi NTT; Biro Hukum Setda Provinsi NTT; Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT; Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT; Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTT.		
81				Penyusunan cetak biru data dan informasi elektronik	APBD	Jumlah dokumen cetak biru data dan informasi elektronik dengan tingkat kematangan	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT (PJ); Biro Organisasi Setda Provinsi		1



No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap	
								2023	2024
						kapabilitas proses yang terkelola/terstandarisasi/terintegrasi dan terukur/optimum	NTT; Biro Hukum Setda Provinsi NTT; Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT; Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT.		
82				Penyusunan cetak biru integrasi layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik	APBD	Jumlah dokumen cetak biru integrasi layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/terstandardisasi/terintegrasi dan terukur/optimum	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT (PJ); Biro Organisasi Setda Provinsi NTT; Biro Hukum Setda Provinsi NTT; Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT; Badan Perencanaan		1



No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap	
								2023	2024
							Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; Inspektorat Daerah Provinsi NTT.		
83				Penyusunan cetak biru integrasi infrastruktur jaringan TIK	APBD	Jumlah dokumen cetak biru integrasi infrastruktur jaringan TIK dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/ terstandardisasi/ terintegrasi dan terukur/optimum	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT (PJ); Biro Organisasi Setda Provinsi NTT; Biro Hukum Setda Provinsi NTT; Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT;		1



No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap	
								2023	2024
							Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT; Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTT.		
84				Penyusunan cetak biru integrasi data dan informasi elektronik	APBD	Jumlah dokumen cetak biru integrasi data dan informasi elektronik dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/ terstandardisasi/ terintegrasi dan terukur/optimum	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT (PJ); Biro Organisasi Setda Provinsi NTT; Biro Hukum Setda Provinsi NTT; Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT; Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; Badan Kepegawaian		1



No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap	
								2023	2024
							Daerah Provinsi NTT.		
85				Penyusunan cetak biru penganggaran dan pembiayaan TIK	APBD	Jumlah dokumen cetak biru penganggaran dan pembiayaan TIK dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/ terstandardisasi/ terintegrasi dan terukur/optimum	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT (PJ); Biro Organisasi Setda Provinsi NTT; Biro Hukum Setda Provinsi NTT; Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT.		1
86				Penyusunan cetak biru pemeliharaan layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik	APBD	Jumlah dokumen cetak biru pemeliharaan layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/ terstandardisasi/ terintegrasi	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT (PJ); Biro Organisasi Setda Provinsi NTT; Biro Hukum Setda Provinsi NTT; Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT; Badan		1



No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap	
								2023	2024
						dan terukur/optimum	Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT.		
87				Penyusunan cetak biru pemeliharaan infrastruktur jaringan TIK	APBD	Jumlah dokumen cetak biru pemeliharaan infrastruktur jaringan TIK dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/terstandardisasi/terintegrasi dan terukur/optimum	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT (PJ); Biro Organisasi Setda Provinsi NTT; Biro Hukum Setda Provinsi NTT; Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT.		1
88				Penyusunan cetak biru struktur organisasi, sistem manajemen,	APBD	Jumlah dokumen cetak biru struktur organisasi, sistem manajemen, dan proses kerja	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT (PJ); Biro Organisasi Setda Provinsi		1



No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap	
								2023	2024
				dan proses kerja		dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/terstandarisasi/terintegrasi dan terukur/optimum	NTT; Biro Hukum Setda Provinsi NTT; Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT; Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT; Inspektorat Daerah Provinsi NTT.		
89				Penyusunan SOP pengelolaan data dan informasi elektronik	APBD	Jumlah SOP pengelolaan data dan informasi elektronik dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/terstandarisasi/terintegrasi dan	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT (PJ); Biro Organisasi Setda Provinsi NTT; Biro Hukum Setda Provinsi NTT; Biro Pemerintahan Setda Provinsi		1

M



No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap	
								2023	2024
						terukur/optimum	NTT; Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT; Inspektorat Daerah Provinsi NTT.		
90				Penyusunan SOP pengoperasian pusat data terpadu	APBD	Jumlah SOP pengoperasian pusat data terpadu dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/ terstandardisasi/ terintegrasi dan terukur/optimum	Dinas Kominfo Provinsi NTT (PJ); Biro Organisasi Setda Provinsi NTT; Biro Hukum Setda Provinsi NTT; Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT; Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi		1



No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap	
								2023	2024
							NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; Inspektorat Daerah Provinsi NTT.		
91				Penyusunan SOP integrasi aplikasi, data, jaringan	APBD	Jumlah SOP integrasi aplikasi, data, jaringan dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/ terstandardisasi/ terintegrasi dan terukur/optimum	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT (PJ); Biro Organisasi Setda Provinsi NTT; Biro Hukum Setda Provinsi NTT; Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT; Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; Inspektorat Daerah Provinsi NTT.		1

14



No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap	
								2023	2024
92				Penyusunan SOP pengelolaan infrastruktur jaringan TIK	APBD	Jumlah SOP pengelolaan infrastruktur jaringan TIK dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/terstandarisasi/ terintegrasi dan terukur/optimum	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT (PJ); Biro Organisasi Setda Provinsi NTT; Biro Hukum Setda Provinsi NTT; Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT; Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTT.		1
93				Penyusunan SOP pengelolaan sistem penghubung layanan	APBD	Jumlah SOP pengelolaan sistem penghubung layanan pemerintah daerah dengan	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT (PJ); Biro Organisasi Setda Provinsi		1

14



No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap	
								2023	2024
				pemerintah daerah		tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/ terstandardisasi/ terintegrasi dan terukur/optimum	NTT; Biro Hukum Setda Provinsi NTT; Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT; Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT.		
94				Penyusunan SOP pengelolaan aplikasi layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik	APBD	Jumlah SOP pengelolaan aplikasi layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/ terstandardisasi/ terintegrasi dan terukur/optimum	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT (PJ); Biro Organisasi Setda Provinsi NTT; Biro Hukum Setda Provinsi NTT; Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT; Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi		1

Ad



No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap	
								2023	2024
							NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; Inspektorat Daerah Provinsi NTT.		
95				Penyusunan SOP pengelolaan aplikasi umum berbagi pakai	APBD	Jumlah SOP pengelolaan aplikasi umum berbagi pakai dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/terstandarisasi/terintegrasi dan terukur/optimum	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT (PJ); Biro Organisasi Setda Provinsi NTT; Biro Hukum Setda Provinsi NTT; Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT; Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT.		1



No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap	
								2023	2024
96				Penyusunan SOP pengelolaan keamanan data dan informasi elektronik	APBD	Jumlah SOP pengelolaan keamanan data dan informasi elektronik dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/ terstandarisasi/ terintegrasi dan terukur/optimum	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT (PJ); Biro Organisasi Setda Provinsi NTT; Biro Hukum Setda Provinsi NTT; Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT; Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT; Inspektorat Daerah Provinsi NTT.		1
97				Penyusunan SOP pengelolaan SDM TIK	APBD	Jumlah SOP pengelolaan SDM TIK dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT (PJ); Biro Organisasi Setda Provinsi		1



No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap	
								2023	2024
						terstandardisasi/terintegrasi dan terukur/optimum	NTT; Biro Hukum Setda Provinsi NTT; Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT; Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT; Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi NTT; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT; Dinas Koperasi, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Provinsi NTT.		

ku



No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap	
								2023	2024
98				Penyusunan SOP pemeliharaan sumberdaya TIK	APBD	Jumlah SOP pemeliharaan sumber daya TIK dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/ terstandardisasi/te rintegrasi dan terukur/optimum	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT (PJ); Biro Organisasi Setda Provinsi NTT; Biro Hukum Setda Provinsi NTT; Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT.		1
99				Penyusunan SOP pembiayaan sumberdaya TIK	APBD	Jumlah SOP pembiayaan sumber daya TIK dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/ terstandardisasi/te rintegrasi dan terukur/optimum	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT (PJ); Biro Organisasi Setda Provinsi NTT; Biro Hukum Setda Provinsi NTT; Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT; Badan Perencanaan Pembangunan,		1



No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap	
								2023	2024
							Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT.		
100				Penyusunan SOP perencanaan sumberdaya TIK	APBD	Jumlah SOP perencanaan sumber daya TIK dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/ terstandarisasi terintegrasi dan terukur/optimum	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT (PJ); Biro Organisasi Setda Provinsi NTT; Biro Hukum Setda Provinsi NTT; Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT; Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT.		1
101				Penyusunan SOP investasi TIK	APBD	Jumlah SOP investasi TIK dengan tingkat kematangan kapabilitas proses	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT (PJ); Biro Organisasi		1



No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap	
								2023	2024
						yang terkelola/terstandarisasi/terintegrasi dan terukur/optimum	Setda Provinsi NTT; Biro Hukum Setda Provinsi NTT; Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT; Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; Inspektorat Daerah Provinsi NTT.		
102				Penyusunan SOP pengelolaan aset TIK	APBD	Jumlah SOP pengelolaan aset TIK dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/terstandarisasi/terintegrasi dan terukur/optimum	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT (PJ); Biro Organisasi Setda Provinsi NTT; Biro Hukum Setda Provinsi NTT; Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT; Badan Perencanaan		1



No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap	
								2023	2024
							Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; Inspektorat Daerah Provinsi NTT.		
103				Penyusunan SOP layanan TIK	APBD	Jumlah SOP layanan TIK dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/terstandarisasi/terintegrasi dan terukur/optimum	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT (PJ); Biro Organisasi Setda Provinsi NTT; Biro Hukum Setda Provinsi NTT; Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT; Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; Inspektorat		1



No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap	
								2023	2024
							Daerah Provinsi NTT.		
104				Penyusunan SOP Pengelolaan Keamanan Informasi	APBD	Jumlah SOP pengelolaan keamanan informasi dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/ terstandardisasi/ terintegrasi dan terukur/optimum	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT (PJ); Biro Organisasi Setda Provinsi NTT; Biro Hukum Setda Provinsi NTT; Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT; Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; Inspektorat Daerah Provinsi NTT; PPID Utama Provinsi NTT; Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT.		1

10



No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap	
								2023	2024
105				Penyusunan SOP pengelolaan risiko dan keberlangsungan bisnis	APBD	Jumlah SOP pengelolaan risiko dan keberlangsungan bisnis dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/terstandarisasi/terintegrasi dan terukur/optimum	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT (PJ); Biro Organisasi Setda Provinsi NTT; Biro Hukum Setda Provinsi NTT; Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT; Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT; Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; Inspektorat Daerah Provinsi NTT.		1
106				Penyusunan SOP kepatuhan dan	APBD	Jumlah SOP kepatuhan dan	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT (PJ);		1



No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap	
								2023	2024
				penilaian internal		penilaian internal dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/ terstandarisasi/ terintegrasi dan terukur/optimum	Biro Organisasi Setda Provinsi NTT; Biro Hukum Setda Provinsi NTT; Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT; Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT; Inspektorat Daerah Provinsi NTT.		
107				Penyusunan SOP pemantauan dan evaluasi pengelolaan TIK	APBD	Jumlah SOP pemantauan dan evaluasi pengelolaan TIK dengan tingkat kematangan kapabilitas proses yang terkelola/terstanda	Dinas Kominfo Provinsi NTT (PJ); Biro Organisasi Setda Provinsi NTT; Biro Hukum Setda Provinsi NTT; Biro Pemerintahan		1

100



No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap	
								2023	2024
						rdisasi/ terintegrasi dan terukur/optimum	Setda Provinsi NTT; Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; Inspektorat Daerah Provinsi NTT.		
108				Pengelolaan Aplikasi system informasi analisis dan evaluasi jabatan	APBD	Jumlah pengelolaan aplikasi sistem informasi analisis dan evaluasi jabatan	Dinas Komunikasi dan Informatika (PJ); Biro Organisasi Setda provinsi NTT; Inspektorat Daerah Provinsi NTT.		1
109				Sistem Standarisasi Barang dan Jasa.	APBD	Jumlah pengelolaan aplikasi system informasi analisis dan evaluasi jabatan	Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT (PJ); Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT; Inspektorat Daerah Provinsi NTT.		1



No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap	
								2023	2024
110				Pengelolaan aplikasi layanan naskah dinas	APBD	Jumlah aplikasi layanan naskah dinas dengan tingkat kematangan kapabilitas fungsi teknis layanan elektronik yang diberikan dalam bentuk informasi/interaksi /transaksi/kolaborasi/optimalisasi	Biro Organisasi Setda Provinsi NTT (PJ); Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT; Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT; Biro Hukum Setda Provinsi NTT; Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT; Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; Inspektorat Daerah Provinsi NTT; Vendor TIK.		1
111				Pengelolaan aplikasi layanan manajemen kepegawaian	APBD	Jumlah aplikasi layanan manajemen kepegawaian dengan tingkat kematangan	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT (PJ); Dinas Komunikasi dan Informatika		1



No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap	
								2023	2024
						kapabilitas fungsi teknis layanan elektronik yang diberikan dalam bentuk informasi/interaksi/transaksi/kolaborasi/optimalisasi	Provinsi NTT; Biro Organisasi Setda Provinsi NTT; Biro Hukum Setda Provinsi NTT; Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; Inspektorat Daerah Provinsi NTT; Vendor TIK.		
112				Pengelolaan aplikasi layanan manajemen perencanaan dan penganggaran	APBD	Jumlah aplikasi layanan manajemen perencanaan dan penganggaran dengan tingkat kematangan kapabilitas fungsi teknis layanan elektronik yang diberikan dalam bentuk informasi/interaksi/transaksi/	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT (PJ); Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT; Biro Organisasi Setda Provinsi NTT; Biro Hukum Setda		1



No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap	
								2023	2024
						kolaborasi/optimalisasi	Provinsi NTT; Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; Inspektorat Daerah Provinsi NTT; Vendor TIK.		
113				Pengelolaan aplikasi layanan manajemen keuangan	APBD	Jumlah aplikasi layanan manajemen keuangan dengan tingkat kematangan kapabilitas fungsi teknis layanan elektronik yang diberikan dalam bentuk informasi/interaksi/transaksi /kolaborasi/optimalisasi	Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT (PJ); Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT; Biro Organisasi Setda Provinsi NTT; Biro Hukum Setda Provinsi NTT; Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT; Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT; Inspektorat		1



No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap	
								2023	2024
							Daerah Provinsi NTT; Vendor TIK.		
114				Pengelolaan aplikasi layanan manajemen aset/barang daerah	APBD	Jumlah aplikasi layanan manajemen aset/barang daerah dengan tingkat kematangan kapabilitas fungsi teknis layanan elektronik yang diberikan dalam bentuk informasi/interaksi / transaksi/kolaborasi/optimalisasi	Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT (PJ); Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT; Biro Organisasi Setda Provinsi NTT; Biro Hukum Setda Provinsi NTT; Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT; Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT; Inspektorat Daerah Provinsi NTT; Vendor TIK.		1
115				Pengelolaan aplikasi	APBD	Jumlah aplikasi layanan	Biro Organisasi Setda Provinsi NTT (PJ);		1



No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap	
								2023	2024
				layanan manajemen kinerja		manajemen kinerja dengan tingkat kematangan kapabilitas fungsi teknis layanan elektronik yang diberikan dalam bentuk informasi/ interaksi/transaksi /kolaborasi/optimalisasi	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT; Biro Hukum Setda Provinsi NTT; Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT; Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; Inspektorat Daerah Provinsi NTT; Vendor TIK.		
116				Pengelolaan aplikasi layanan pengadaan	APBD	Jumlah aplikasi layanan pengadaan dengan tingkat kematangan kapabilitas fungsi teknis layanan elektronik yang diberikan dalam bentuk informasi/interaksi/transaksi/	Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT (PJ); Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT; Biro Organisasi Setda Provinsi NTT; Biro Hukum Setda		1

1a



No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap	
								2023	2024
						kolaborasi/optimalisasi	Provinsi NTT; Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT; Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; Inspektorat Daerah Provinsi NTT; LKPP/LPSE Provinsi NTT.		
117				Pengelolaan aplikasi layanan surat elektronik	APBD	Jumlah aplikasi layanan surat elektronik dengan tingkat kematangan kapabilitas fungsi teknis layanan elektronik yang diberikan dalam bentuk informasi/interaksi/transaksi/kolaborasi/optimalisasi	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT (PJ); Biro Organisasi Setda Provinsi NTT; Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT; Biro Hukum Setda Provinsi NTT; Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT; Badan	1	

14



No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap	
								2023	2024
							Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; Inspektorat Daerah Provinsi NTT.		
118				Pengelolaan aplikasi sistem pendukung keputusan (Manajemen Pengetahuan)	APBD	Jumlah sistem pendukung keputusan dengan tingkat kematangan kapabilitas fungsi teknis layanan elektronik yang diberikan dalam bentuk informasi/interaksi /transaksi/kolaborasi/optimalisasi	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi NTT (PJ); Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT; Biro Organisasi Setda Provinsi NTT; Biro Hukum Setda Provinsi NTT; Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT; Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi		1

118



No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap	
								2023	2024
							NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; Inspektorat Daerah Provinsi NTT; Vendor TIK.		
119				Pengelolaan sistem informasi kerjasama dalam negeri non investasi	APBD	Jumlah aplikasi layanan kolaborasi dan koordinasi dengan tingkat kematangan kapabilitas fungsi teknis layanan elektronik yang diberikan dalam bentuk informasi/interaksi /transaksi/kolaborasi/optimalisasi	Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT (PJ); Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT; Biro Organisasi Setda Provinsi NTT; Biro Hukum Setda Provinsi NTT; Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; Inspektorat Daerah Provinsi NTT; Vendor TIK.		1



No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap	
								2023	2024
120				Pengelolaan aplikasi manajemen pelaporan pemerintahan daerah (LPPD)	APBD	Jumlah aplikasi manajemen pelaporan pemerintahan daerah dengan tingkat kematangan kapabilitas fungsi teknis layanan elektronik yang diberikan dalam bentuk informasi/interaksi /transaksi/kolaborasi/optimalisasi	Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT (PJ); Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT; Biro Organisasi Provinsi NTT; Biro Hukum Setda Provinsi NTT; Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; Inspektorat Daerah Provinsi NTT; Vendor TIK.		1
121				Pengelolaan aplikasi sistem administrasi DPRD	APBD	Jumlah aplikasi sistem administrasi DPRD dengan	Sekretariat DPRD Provinsi NTT (PJ); Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT;		1

ku



No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap	
								2023	2024
						tingkat kematangan kapabilitas fungsi teknis layanan elektronik yang diberikan dalam bentuk informasi/ interaksi/transaksi /kolaborasi/optimalisasi	Biro Organisasi Setda Provinsi NTT; Biro Hukum Setda Provinsi NTT; Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT; Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; Inspektorat Daerah Provinsi NTT; Vendor TIK.		
122				Pengelolaan aplikasi layanan pendidikan dan pelatihan	APBD	Jumlah aplikasi layanan pendidikan dan pelatihan dengan tingkat kematangan kapabilitas fungsi teknis layanan elektronik yang diberikan dalam bentuk	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi NTT (PJ); Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT; Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT;		1



No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap	
								2023	2024
						informasi/interaksi /transaksi/kolaborasi/optimalisasi	Biro Hukum Setda Provinsi NTT; Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; Inspektorat Daerah Provinsi NTT; Vendor TIK.		
123				Pengelolaan aplikasi layanan penelitian dan pengembangan	APBD	Jumlah aplikasi layanan penelitian dan pengembangan dengan tingkat kematangan kapabilitas fungsi teknis layanan elektronik yang diberikan dalam bentuk informasi/interaksi /transaksi/kolaborasi/optimalisasi	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT (PJ); Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT; Biro Hukum Setda Provinsi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; Inspektorat Daerah Provinsi NTT; Vendor TIK.		1

14



No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap	
								2023	2024
124				Pengelolaan integrasi aplikasi layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik	APBD	Jumlah integrasi aplikasi layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik dengan tingkat	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT (PJ); Biro Hukum Setda Provinsi NTT; Biro Organisasi Setda Provinsi NTT;		1
125						kematangan kapabilitas fungsi teknis layanan elektronik yang diberikan dalam bentuk informasi/interaksi /transaksi/kolaborasi/optimalisasi	Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT; Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; Inspektorat Daerah Provinsi NTT; Vendor TIK		
126				Pengelolaan interoperabilitas aplikasi layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik	APBD	Jumlah interoperabilitas aplikasi layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik dengan tingkat	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT (PJ); Biro Hukum Setda Provinsi NTT; Biro Organisasi Setda Provinsi		1

mu



No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap	
								2023	2024
						kematangan kapabilitas fungsi teknis layanan elektronik yang diberikan dalam bentuk informasi/interaksi/transaksi/kolaborasi/optimalisasi	NTT; Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT; Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; Inspektorat Daerah Provinsi NTT; Vendor TIK.		
127				Pengelolaan aplikasi layanan pengaduan public	APBD	Jumlah aplikasi layanan pengaduan public dengan tingkat kematangan kapabilitas fungsi teknis layanan elektronik yang diberikan dalam bentuk informasi/interaksi/transaksi/kolaborasi/optimalisasi	Inspektorat Daerah Provinsi NTT (PJ); Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT; Biro Organisasi Setda Provinsi NTT; Biro Hukum Setda Provinsi NTT; Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT; Badan Perencanaan	1	

ku



No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap	
								2023	2024
							Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; Vendor TIK.		
128				Pengelolaan aplikasi layanan dokumentasi dan informasi hukum	APBD	Jumlah aplikasi layanan dokumentasi dan informasi hukum dengan tingkat kematangan kapabilitas fungsi teknis layanan elektronik yang diberikan dalam bentuk informasi/interaksi /transaksi/kolaborasi/optimalisasi	Biro Hukum Setda Provinsi NTT (PJ); Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT; Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; Inspektorat Daerah Provinsi NTT; Vendor TIK.	1	
129				Pengelolaan aplikasi layanan whistle blowing system	APBD	Jumlah aplikasi layanan whistle blowing sistem dengan tingkat	Inspektorat Daerah Provinsi NTT (PJ); Dinas Komunikasi dan Informatika		1



No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap	
								2023	2024
						kematangan kapabilitas fungsi teknis layanan elektronik yang diberikan dalam bentuk informasi/ interaksi/transaksi /kolaborasi/optimalisasi	Provinsi NTT; Biro Organisasi Setda Provinsi NTT; Biro Hukum Setda Provinsi NTT; Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT; Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; Vendor TIK.		
130				Pengelolaan aplikasi layanan perpajakan dan retribusi daerah	APBD	Jumlah aplikasi layanan perpajakan dan retribusi daerah dengan tingkat kematangan kapabilitas fungsi	Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT (PJ); Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT; Biro Hukum Setda Provinsi NTT; Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan		1

14



No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap	
								2023	2024
						teknis layanan elektronik yang diberikan dalam bentuk informasi/interaksi/transaksi/kolaborasi/optimalisasi transaksi/kolaborasi/optimalisasi	Daerah Provinsi NTT; Inspektorat Daerah Provinsi NTT; Vendor TIK.		
131				Pengelolaan aplikasi layanan perizinan terpadu	APBD	Jumlah aplikasi layanan perizinan terpadu dengan tingkat kematangan kapabilitas fungsi teknis layanan elektronik yang diberikan dalam bentuk informasi/interaksi/transaksi/kolaborasi/optimalisasi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT (PJ); Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT; Biro Hukum Setda Provinsi NTT; Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; Inspektorat Daerah Provinsi NTT; Vendor TIK.	1	



No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap	
								2023	2024
132				Pengelolaan aplikasi layanan informasi publik terpadu	APBD	Jumlah aplikasi layanan informasi public terpadu dengan tingkat kematangan kapabilitas fungsi teknis layanan elektronik yang diberikan dalam bentuk informasi/interaksi /transaksi/kolaborasi/optimalisasi	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT (PJ); Biro Organisasi Setda Provinsi NTT; Biro Hukum Setda Provinsi NTT; Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT; Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; Inspektorat Daerah Provinsi NTT; PPID Utama Provinsi NTT; Vendor TIK.	1	
133				Pengelolaan aplikasi layanan pendidikan	APBD	Jumlah aplikasi layanan pendidikan dengan tingkat kematangan kapabilitas fungsi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT (PJ); Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT;		1

ku



No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap	
								2023	2024
						teknis layanan elektronik yang diberikan dalam bentuk informasi/interaksi /transaksi/kolaborasi/optimalisasi	Biro Hukum Setda Provinsi NTT; Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; Inspektorat Daerah Provinsi NTT; Vendor TIK.		
134				Pengelolaan aplikasi layanan pekerjaan umum dan penataan ruang	APBD	Jumlah aplikasi layanan pekerjaan umum dan penataan ruang dengan tingkat kematangan kapabilitas fungsi teknis layanan elektronik yang diberikan dalam bentuk informasi/interaksi /transaksi/kolaborasi/optimalisasi	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT (PJ); Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTT (PJ) ; Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT; Biro Hukum Setda Provinsi NTT; Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan		1



No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap	
								2023	2024
							Pengembangan Daerah Provinsi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; Inspektorat Daerah Provinsi NTT; Vendor TIK.		
135				Pengelolaan aplikasi layanan pekerjaan umum dan penataan ruang	APBD	Jumlah aplikasi layanan perumahan rakyat dan kawasan permukiman dengan tingkat kematangan kapabilitas fungsi teknis layanan elektronik yang diberikan dalam bentuk informasi/	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PJ); Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTT (PJ); Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT; Biro Hukum Setda Provinsi NTT; Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; Dinas Lingkungan		1

mu



No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap	
								2023	2024
						interaksi/transaksi /kolaborasi/optimalisasi	Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT; Inspektorat Daerah Provinsi NTT; Vendor TIK.		
136				Pengelolaan aplikasi layanan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	APBD	Jumlah aplikasi layanan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dengan tingkat kematangan kapabilitas fungsi teknis layanan elektronik yang diberikan dalam bentuk informasi/interaksi /transaksi/kolaborasi/optimalisasi	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT (PJ); Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi NTT; Biro Hukum Setda Provinsi NTT; Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT; Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; Inspektorat Daerah Provinsi NTT; Vendor TIK.		1
137				Pengelolaan aplikasi	APBD	Jumlah aplikasi layanan sosial	Dinas Sosial Provinsi NTT (PJ);		1



No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap	
								2023	2024
				layanan sosial		dengan tingkat kematangan kapabilitas fungsi teknis layanan elektronik yang diberikan dalam bentuk informasi/interaksi /transaksi/kolaborasi/optimalisasi	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT; Biro Hukum Setda Provinsi NTT; Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; Inspektorat Daerah Provinsi NTT; Vendor TIK.		
138				Pengelolaan aplikasi layanan tenaga kerja	APBD	Jumlah aplikasi layanan tenaga kerja dengan tingkat kematangan kapabilitas fungsi teknis layanan elektronik yang diberikan dalam bentuk informasi/interaksi /transaksi/kolaborasi/optimalisasi	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Provinsi NTT (PJ); Dinas Komunikasi dan Informatika provinsi NTT; Biro Hukum Setda Provinsi NTT; Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan		1

ku



No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap	
								2023	2024
							Daerah Provinsi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; Inspektorat Daerah Provinsi NTT; Vendor TIK.		
139				Pengelolaan aplikasi layanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	APBD	Jumlah aplikasi layanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan tingkat kematangan kapabilitas	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT (PJ); Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT; Biro Hukum Setda Provinsi NTT; Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT;		1
						fungsi teknis layanan elektronik yang diberikan	Inspektorat Daerah Provinsi NTT; Vendor TIK.		



No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap	
								2023	2024
						dalam bentuk informasi/ interaksi/transaksi /kolaborasi/optimalisasi			
140				Pengelolaan aplikasi layanan pangan dan pertanian	APBD	Jumlah aplikasi layanan pangan dengan tingkat kematangan kapabilitas fungsi teknis layanan elektronik yang diberikan dalam bentuk informasi/interaksi /transaksi/kolaborasi/optimalisasi	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT (PJ); Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT; Biro Hukum Setda Provinsi NTT; Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; Inspektorat Daerah Provinsi NTT; Vendor TIK.		1
141				Pengelolaan aplikasi layanan lingkungan	APBD	Jumlah aplikasi layanan lingkungan hidup dengan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT (PJ);		1



No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap	
								2023	2024
				hidup		tingkat kematangan kapabilitas fungsi teknis layanan elektronik yang diberikan dalam bentuk informasi/ interaksi/transaksi /kolaborasi/optimalisasi	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT; Biro Hukum Setda Provinsi NTT; Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; Inspektorat Daerah Provinsi NTT; Vendor TIK.		
142				Pengelolaan aplikasi layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	APBD	Jumlah aplikasi layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan tingkat kematangan kapabilitas fungsi teknis layanan elektronik yang diberikan dalam bentuk informasi/	Dinas Kesehatan Provinsi NTT (PJ); Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT; Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT; Biro Hukum Setda Provinsi NTT; Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan		1

14



No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap	
								2023	2024
						interaksi/transaksi /kolaborasi/optimalisasi.	Daerah Provinsi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; Inspektorat Daerah Provinsi NTT; Vendor TIK.		
143				Pengelolaan aplikasi layanan pengendalian penduduk dan keluarga berencana	APBD	Jumlah aplikasi layanan pengendalian penduduk dan keluarga berencana dengan tingkat kematangan kapabilitas fungsi teknis layanan elektronik yang diberikan dalam bentuk informasi/ interaksi/transaksi / kolaborasi/optimalisasi	Dinas Kesehatan Provinsi NTT (PJ); Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT; Biro Hukum Setda Provinsi NTT; Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; Inspektorat Daerah Provinsi NTT; Vendor TIK.		1
144				Pengelolaan aplikasi layanan	APBD	Jumlah aplikasi layanan perhubungan	Dinas Perhubungan Provinsi NTT (PJ);		1

ku



No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap	
								2023	2024
				perhubungan		dengan tingkat kematangan kapabilitas fungsi teknis layanan elektronik yang diberikan dalam bentuk informasi/interaksi /transaksi/kolaborasi/optimalisasi	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT; Biro Hukum Setda Provinsi NTT; Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; Inspektorat Daerah Provinsi NTT; Vendor TIK.		
145				Pengelolaan aplikasi layanan komunikasi dan informatika	APBD	Jumlah aplikasi layanan komunikasi dan informatika dengan tingkat kematangan kapabilitas fungsi teknis layanan elektronik yang diberikan dalam bentuk informasi/interaksi /transaksi/kolaborasi/	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT (PJ); Biro Hukum Setda Provinsi NTT; Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi		1



No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap	
								2023	2024
						optimalisasi	NTT; Inspektorat Daerah Provinsi NTT; Vendor TIK.		
146				Pengelolaan aplikasi layanan koperasi, usaha kecil, dan menengah	APBD	Jumlah aplikasi layanan koperasi, usaha kecil, dan menengah dengan tingkat kematangan kapabilitas fungsi teknis layanan elektronik yang	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Provinsi NTT (PJ); Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT; Biro Hukum Setda Provinsi NTT; Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT;		1
						diberikan dalam bentuk informasi/interaksi /transaksi/kolaborasi/optimalisasi	Inspektorat Daerah Provinsi NTT; Vendor TIK.		
147				Pengelolaan aplikasi layanan penanaman modal	APBD	Jumlah aplikasi layanan penanaman modal dengan tingkat	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT	1	

14



No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap	
								2023	2024
						kematangan kapabilitas fungsi teknis layanan elektronik yang diberikan dalam bentuk informasi/ interaksi/transaksi /kolaborasi/optimalisasi	(PJ); Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT; Biro Hukum Setda Provinsi NTT; Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; Inspektorat Daerah Provinsi NTT; Vendor TIK.		
148				Pengelolaan aplikasi layanan kepemudaan dan olahraga	APBD	Jumlah aplikasi layanan kepemudaan dan olahraga dengan tingkat kematangan kapabilitas fungsi teknis	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT (PJ); Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT; Biro Hukum Setda Provinsi NTT;		1
						layanan elektronik yang diberikan dalam bentuk informasi/interaksi	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan		

fu



No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap	
								2023	2024
						/transaksi/kolaborasi/optimalisasi	Daerah Provinsi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; Inspektorat Daerah Provinsi NTT; Vendor TIK.		
149				Pengelolaan aplikasi layanan statistik	APBD	Jumlah aplikasi layanan statistic dengan tingkat kematangan kapabilitas fungsi teknis layanan elektronik yang diberikan dalam bentuk informasi/interaksi /transaksi/kolaborasi/optimalisasi	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT (PJ); Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; Biro Hukum Setda Provinsi NTT; Inspektorat Daerah Provinsi NTT; Vendor TIK.		1
150				Pengelolaan aplikasi layanan kebudayaan	APBD	Jumlah aplikasi layanan kebudayaan dengan tingkat kematangan kapabilitas fungsi	Dinas Pendidikan & Kebudayaan Provinsi NTT (PJ); Dinas Komunikasi dan Informatika		1

mu

No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap	
								2023	2024
						teknis layanan elektronik yang diberikan dalam bentuk informasi/interaksi /transaksi/kolaborasi/optimalisasi	Provinsi NTT; Biro Hukum Setda Provinsi NTT; Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; Inspektorat Daerah Provinsi NTT; Vendor TIK.		
151				Pengelolaan aplikasi layanan perpustakaan	APBD	Jumlah aplikasi layanan perpustakaan dengan tingkat kematangan kapabilitas fungsi teknis layanan elektronik yang diberikan dalam bentuk informasi/interaksi /transaksi/kolaborasi/optimalisasi	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT (PJ); Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT; Biro Hukum Setda Provinsi NTT; Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT;	1	



No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap	
								2023	2024
							Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; Inspektorat Daerah Provinsi NTT; Vendor TIK.		
152				Pengelolaan aplikasi layanan kearsipan	APBD	Jumlah aplikasi layanan kearsipan dengan tingkat kematangan kapabilitas fungsi	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT (PJ); Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT;		1
						teknis layanan elektronik yang diberikan dalam bentuk informasi/interaksi /transaksi/kolaborasi/optimalisasi	Biro Hukum Setda Provinsi NTT; Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; Inspektorat Daerah Provinsi NTT; Vendor TIK.		
153				Pengelolaan aplikasi layanan pariwisata	APBD	Jumlah aplikasi layanan pariwisata dengan tingkat	Dinas Pariwisata dan EKonomi Kreatif Provinsi NTT		1

No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap	
								2023	2024
						kematangan kapabilitas fungsi teknis layanan elektronik yang diberikan dalam bentuk informasi/interaksi /transaksi/kolaborasi/optimalisasi	(PJ); Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT; Biro Hukum Setda Provinsi NTT; Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; Inspektorat Daerah Provinsi NTT; Vendor TIK.		
154				Pengelolaan aplikasi layanan perdagangan	APBD	Jumlah aplikasi layanan perdagangan dengan tingkat kematangan kapabilitas fungsi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT (PJ);		1
						teknis layanan elektronik yang diberikan dalam bentuk informasi/interaksi /transaksi/kolaborasi/optimalisasi	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT; Biro Hukum Setda Provinsi NTT; Badan Perencanaan Pembangunan,		

ku



No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap	
								2023	2024
							Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; Inspektorat Daerah Provinsi NTT; Vendor TIK.		
155				Pengelolaan aplikasi layanan perindustrian	APBD	Jumlah aplikasi layanan perindustrian dengan tingkat kematangan kapabilitas fungsi teknis layanan elektronik yang diberikan dalam bentuk informasi/interaksi /transaksi/kolaborasi/optimalisasi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT (PJ); Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT; Biro Hukum Setda Provinsi NTT; Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; Inspektorat Daerah Provinsi NTT; Vendor TIK.		1

12

No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap	
								2023	2024
156				Pengelolaan integrasi aplikasi layanan	APBD	Jumlah integrasi aplikasi	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT (PJ);		1
				publik berbasis elektronik		layanan publik berbasis elektronik dengan tingkat kematangan kapabilitas fungsi teknis layanan elektronik yang diberikan dalam bentuk informasi/interaksi /transaksi/kolaborasi/optimalisasi	Biro Organisasi Setda Provinsi NTT; Biro Hukum Setda Provinsi NTT; Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT; Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; Inspektorat Daerah Provinsi NTT; Vendor TIK.		
157				Pengelolaan interoperabilitas aplikasi layanan publik berbasis elektronik	APBD	Jumlah interoperabilitas aplikasi layanan publik berbasis elektronik dengan tingkat kematangan	Dinas Kominfo Provinsi NTT (PJ); Biro Organisasi Setda Provinsi NTT; Biro Hukum Setda Provinsi NTT;		1



No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap	
								2023	2024
						kapabilitas fungsi teknis layanan elektronik yang diberikan dalam bentuk informasi/ interaksi/transaksi /kolaborasi/optimalisasi	Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT; Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; Inspektorat Daerah Provinsi NTT; Vendor TIK.		
158				Pengelolaan data dan informasi elektronik	APBD	Persentase pengelolaan data dan informasi elektronik	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT (PJ); Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; Vendor TIK.		100
159				Pengelolaan pusat data terpadu (DC/DRC)	APBD	Jumlah pusat data terpadu (DC dan DRC) yang dikelola	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT (PJ);		1

No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap	
								2023	2024
							Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; Vendor TIK.		
160				Pengelolaan infrastruktur jaringan TIK (Intranet/Internet: LAN, WAN, FO)	APBD	Persentase pengelolaan infrastruktur jaringan TIK	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT (PJ); Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; Vendor TIK.	100	
161				Pengelolaan perangkat keras	APBD	Persentase pengelolaan perangkat keras	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT (PJ); Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan	100	



No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap	
								2023	2024
							Pengembangan Daerah Provinsi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; Vendor TIK.		
162				Penambahan kapasitas bandwidth Internet	APBD	Jumlah kapasitas bandwidth Internet (MBPS) yang ditambahkan	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT (PJ); Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; Vendor TIK.		4 GB
163				Pengadaan akses Internet publik gratis di ruang publik	APBD	Jumlah titik akses Internet publik gratis di ruang publik yang diadakan	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT (PJ); Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT; Badan Keuangan		10

No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap	
								2023	2024
							Daerah Provinsi NTT; Vendor TIK.		
164				Pengelolaan interoperabilitas sistem pemerintahan berbasis elektronik	APBD	Persentase pengelolaan interoperabilitas sistem pemerintahan berbasis elektronik	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT (PJ); Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; Vendor TIK.		100
165				Pengelolaan keamanan data dan informasi elektronik	APBD	Persentase pengelolaan keamanan data dan informasi elektronik	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT (PJ); Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT; Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT;		100

mu



No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap	
								2023	2024
							Biro Hukum Setda Provinsi NTT; Vendor TIK.		
166				Pengelolaan keamanan pusat data terpadu.	APBD	Persentase pengelolaan keamanan pusat data terpadu.	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT (PJ); Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; Biro Hukum Setda Provinsi NTT; Vendor TIK.		100
167				Pengelolaan Keamanan infrastruktur jaringan TIK	APBD	Persentase pengelolaan keamanan infrastruktur jaringan TIK	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT (PJ); Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; Biro Hukum Setda		100

19

No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap	
								2023	2024
							Provinsi NTT; Vendor TIK.		
168				Pengelolaan keamanan sistem penghubung layanan pemerintah daerah	APBD	Persentase pengelolaan keamanan sistem penghubung layanan pemerintah daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT (PJ); Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; Biro Hukum Setda Provinsi NTT; Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT; Vendor TIK.		100
169				Pengelolaan keamanan aplikasi layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik	APBD	Persentase pengelolaan keamanan aplikasi layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT (PJ); Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT;		100

14



No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap	
								2023	2024
							Biro Hukum Setda Provinsi NTT; Biro Organisasi Setda Provinsi NTT; Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT; Vendor TIK.		
170				Pengelolaan prosedur keamanan sistem pemerintahan berbasis elektronik	APBD	Persentase pengelolaan prosedur keamanan sistem pemerintahan berbasis elektronik	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT (PJ); Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; Biro Hukum Setda Provinsi NTT; Biro Organisasi Setda Provinsi NTT; Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT; Vendor TIK.		100
171				Pengelolaan keamanan	APBD	Persentase pengelolaan	Dinas Komunikasi dan Informatika		100

14

No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap	
								2023	2024
				akses sistem pemerintahan berbasis elektronik		keamanan akses sistem pemerintahan berbasis elektronik	Provinsi NTT (PJ); Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; Biro Hukum Setda Provinsi NTT; Vendor TIK.		
172				Pengelolaan keamanan dokumen elektronik	APBD	Persentase pengelolaan keamanan dokumen elektronik	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT (PJ); Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; Biro Hukum Setda Provinsi NTT; Biro Organisasi Setda Provinsi NTT;		100

14



No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap	
								2023	2024
							Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT; Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT; Vendor TIK.		
173				Pengelolaan keamanan ruangan sistem pemerintahan berbasis elektronik	APBD	Persentase pengelolaan keamanan ruangan sistem pemerintahan berbasis elektronik	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT (PJ); Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; Biro Hukum Setda Provinsi NTT; Vendor TIK.		100
174				Pengelolaan keamanan interoperabilitas sistem pemerintahan berbasis elektronik	APBD	Persentase pengelolaan keamanan interoperabilitas sistem pemerintahan berbasis elektronik	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT (PJ); Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT;		100

No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap	
								2023	2024
							Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; Biro Hukum Setda Provinsi NTT; Vendor TIK.		
175				Audit keamanan Jaringan	APBD	Persentase audit keamanan jaringan	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT (PJ); Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; Biro Hukum Setda Provinsi NTT; Inspektorat Daerah Provinsi NTT; Vendor TIK; BSSN/BRIN.		100

ku



No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap	
								2023	2024
176				Audit keamanan aplikasi	APBD	Persentase audit keamanan aplikasi	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT (PJ); Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; Biro Hukum Setda Provinsi NTT; Inspektorat Daerah Provinsi NTT; Vendor TIK; BSSN/BRIN.		100
177				Audit keamanan penyimpanan	APBD	Persentase audit keamanan penyimpanan	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT (PJ); Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi		100

M

No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap	
								2023	2024
							NTT; Biro Hukum Setda Provinsi NTT; Inspektorat Daerah Provinsi NTT; Vendor TIK; BSSN.		
178				Audit keamanan Informasi	APBD	Persentase audit keamanan informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT (PJ); Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; Biro Hukum Setda Provinsi NTT; Inspektorat Daerah Provinsi NTT; Vendor TIK; BSSN.		100
179				Audit keamanan Siber	APBD	Persentase audit keamanan siber	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT (PJ); Badan Perencanaan		100



No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap	
								2023	2024
							Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; Biro Hukum Setda Provinsi NTT; Inspektorat Daerah Provinsi NTT; Vendor TIK; BSSN.		
180				Transformasi dokumen elektronik (alih media)	APBD	Persentase transformasi dokumen elektronik (alih media)	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT (PJ); Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT; Biro Hukum Setda Provinsi NTT; Biro Organisasi Setda Provinsi NTT; Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT; Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan		100

M

No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap	
								2023	2024
							Pengembangan Daerah Provinsi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; Vendor TIK.		
181				Penandaan digital dan watermarking dokumen elektronik	APBD	Persentase penandaan digital dan watermarking dokumen elektronik	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT (PJ); Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT; Biro Hukum Setda Provinsi NTT; Biro Organisasi Setda Provinsi NTT; Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT; Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; Vendor TIK.		100
182				Pemeliharaan dan	APBD	Persentase pemeliharaan dan	Dinas Komunikasi dan Informatika		100

ku,



No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap	
								2023	2024
				pemusnahan dokumen		pemusnahan dokumen	Provinsi NTT (PJ); Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT; Biro Hukum Setda Provinsi NTT; Biro Organisasi Setda Provinsi NTT; Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT; Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; Vendor TIK.		
183				Penetapan standarisasi metadata dan format	APBD	Persentase penetapan standarisasi metadata dan	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT (PJ);		100

M

No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap	
								2023	2024
				akses, pertukaran dan publikasi, dan prosedur		format akses, pertukaran dan publikasi, dan prosedur	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT; Biro Hukum Setda Provinsi NTT; Biro Organisasi Setda Provinsi NTT; Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT; Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; Vendor TIK.		
184				Evaluasi dan perbaikan pelaksanaan investasi TIK	APBD	Persentase evaluasi dan perbaikan pelaksanaan investasi TIK	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT (PJ); Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT; Badan Keuangan		100

ku



No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap	
								2023	2024
							Daerah Provinsi NTT; Biro Organisasi Setda Provinsi NTT; Biro Hukum Setda Provinsi NTT.		
				Evaluasi dan perbaikan pelaksanaan pengelolaan aset TIK	APBD	Persentase evaluasi dan perbaikan pelaksanaan pengelolaan aset TIK	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT (PJ); Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; Biro Organisasi Setda Provinsi NTT; Biro Hukum Setda Provinsi NTT.		100
185				Evaluasi dan perbaikan pelaksanaan layanan TIK	APBD	Persentase evaluasi dan perbaikan pelaksanaan layanan TIK	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT (PJ); Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan		100

14.

No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap	
								2023	2024
							Pengembangan Daerah Provinsi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; Biro Organisasi Setda Provinsi NTT; Biro Hukum Setda Provinsi NTT.		
186				Evaluasi dan perbaikan pelaksanaan pengelolaan keamanan informasi	APBD	Persentase evaluasi dan perbaikan pelaksanaan pengelolaan keamanan informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT (PJ); Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; Biro Organisasi Setda Provinsi NTT; Biro Hukum Setda Provinsi NTT; Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT.		100

186



No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap	
								2023	2024
187				Evaluasi dan perbaikan pelaksanaan pengelolaan risiko dan keberlangsungan bisnis	APBD	Persentase evaluasi dan perbaikan pelaksanaan pengelolaan risiko dan keberlangsungan bisnis	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT (PJ); Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; Biro Organisasi Setda Provinsi NTT; Biro Hukum Setda Provinsi NTT; Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT; Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT.		100
188				Evaluasi dan perbaikan pelaksanaan kepatuhan dan penilaian internal	APBD	Persentase evaluasi dan perbaikan pelaksanaan kepatuhan dan penilaian	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT (PJ); Badan Perencanaan		100

mu

No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap	
								2023	2024
						internal	Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; Biro Organisasi Setda Provinsi NTT; Biro Hukum Setda Provinsi NTT; Inspektorat Daerah Provinsi NTT.		
189				Evaluasi dan perbaikan pengamanan aset informasi	APBD	Persentase evaluasi dan perbaikan pengamanan aset informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT (PJ); Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; Biro Organisasi Setda Provinsi NTT;		100

M



No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap	
								2023	2024
							Biro Hukum Setda Provinsi NTT.		
190				Evaluasi dan perbaikan pengamanan aset pengolahan informasi	APBD	Persentase evaluasi dan perbaikan pengamanan aset pengolahan informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT (PJ); Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; Biro Organisasi Setda Provinsi NTT; Biro Hukum Setda Provinsi NTT.		100
191				Evaluasi dan Perbaikan pengamanan penyimpanan informasi	APBD	Persentase evaluasi dan perbaikan pengamanan penyimpanan informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT (PJ); Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT; Badan Keuangan Daerah Provinsi		100

ku

No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap	
								2023	2024
							NTT; Biro Organisasi Setda Provinsi NTT; Biro Hukum Setda Provinsi NTT; Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT.		
192				Perbaikan sistem pembayaran pajak kendaraan bermotor berbasis elektronik	APBD	Persentase perbaikan sistem pembayaran pajak kendaraan bermotor berbasis elektronik	Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT (PJ); Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT; Samsat Kabupaten/Kota se NTT.		100
193				Perbaikan sistem penerimaan pajak (Penginapan, Restoran, Gedung, Perdagangan, Jasa) berbasis elektronik	APBD	Persentase perbaikan sistem penerimaan pajak berbasis elektronik	Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT (PJ); Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT.		100
194				Pengadaan SDM TIK	APBD	Jumlah SDM TIK yang diadakan	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT (PJ);		10

mu



No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap	
								2023	2024
							Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT.		
195				Peningkatan kompetensi SDM TIK (pendidikan, pelatihan, sertifikasi)	APBD	Jumlah SDM TIK yang dilatih	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT (PJ); Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT; Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi NTT.		100
196				Penelitian dan pengembangan pengelolaan sumberdaya TIK	APBD	Jumlah penelitian dan pengembangan pengelolaan sumberdaya TIK	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT (PJ); Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT.		10
197				Penelitian dan pengembangan literasi digital	APBD	Jumlah penelitian dan pengembangan literasi digital	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT (PJ); Dinas Komunikasi		10

mu

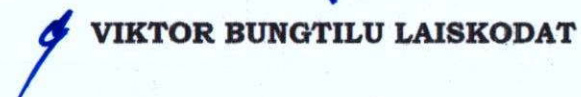
No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap	
								2023	2024
							dan Informatika Provinsi NTT.		
198	Pengelolaan kawasan rawan bencana	Mengembangkan sistem informasi mitigasi bencana	Mengembangkan sistem informasi mitigasi bencana berbasis real-time data.	Pengembangan digital database kebencanaan	APBD	Persentase peningkatan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana di Kawasan Rawan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTT (PJ); Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT; Bisnis; Komunitas.		100
199				Pengembangan sistem informasi kebencanaan	APBD	Persentase peningkatan dan pengembangan sistem informasi kebencanaan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTT dan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT (PJ); Dinas Komunikasi dan Informatika Kab/Kota; Bisnis; Komunitas.		100

mu



No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rumusan Strategi	Solusi Indikatif	Sumber Dana	Indikator	Pemangku Kepentingan (Pentahelix)	Roadmap	
								2023	2024
200				Penyusunan road map mitigasi bencana berbasis teknologi digital	APBD	Persentase progress pengembangan penyusunan roadmap	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTT (PJ); Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT.		100


 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


 VIKTOR BUNGILU LAISKODAT